

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penentuan pusat pelayanan di Kabupaten Pati menggunakan diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan analisis kawasan perkotaan yang telah dilakukan menggunakan klasifikasi perdesaan perkotaan Perka BPS 2020 dan GHS-SMOD tahun 2020, kawasan perkotaan di Kabupaten Pati sebanyak 193 desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai kawasan perkotaan.
2. Hasil analisis skalogram menunjukkan bahwa tingkat kelengkapan fasilitas pelayanan di kawasan perkotaan Kabupaten Pati masih beragam dan menghasilkan lima hirarki pelayanan. Perkotaan Pati berada pada Hirarki I karena memiliki kelengkapan fasilitas tertinggi. Perkotaan Juwana dan Tayu termasuk Hirarki II, sedangkan Perkotaan Margorejo, Margoyoso, Kayen, Dukuhseti, dan Trangkil berada pada Hirarki III. Perkotaan Batangan dan Wedarijaksa termasuk Hirarki IV, sementara Perkotaan Jaken, Jakenan, Cluwak, Sukolilo, Gembong, Tlogowungu, Gunungwungkal, Winong, Gabus, Tambakromo, dan Pucakwangi berada pada Hirarki V. Perbedaan hirarki tersebut menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas pelayanan di Kabupaten Pati belum merata sehingga kemampuan setiap kawasan dalam melayani kebutuhan masyarakat juga berbeda.
3. Hasil overlay Kernel Density yang menggabungkan kepadatan jaringan jalan, bangunan permukiman, dan persebaran sarana menghasilkan lima hirarki perkembangan kawasan. Perkotaan Pati dan Juwana berada pada Hirarki I karena memiliki tingkat kepadatan jalan, bangunan permukiman, dan sarana pelayanan paling tinggi. Perkotaan Tayu, Margoyoso, Trangkil, Wedarijaksa, dan Margorejo termasuk Hirarki II, sedangkan Perkotaan Batangan, Gabus, Winong, Tambakromo, dan Kayen berada pada Hirarki III. Perkotaan Jakenan, Dukuhseti, Cluwak, Pucakwangi, dan Gunungwungkal termasuk Hirarki IV, sementara Perkotaan Tlogowungu, Jaken, Sukolilo, dan Gembong berada pada Hirarki V. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat perkembangan kawasan dipengaruhi oleh aksesibilitas, konsentrasi permukiman, serta ketersediaan sarana pelayanan yang berbeda pada setiap kawasan.

4. Penggabungan hasil analisis skalogram dan Kernel Density menghasilkan sistem pusat pelayanan Kabupaten Pati yang terdiri atas tiga tingkatan, yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lokal (PPL). Perkotaan Pati, Juwana, dan Tayu ditetapkan sebagai PKL karena memiliki kelengkapan fasilitas, aksesibilitas, dan tingkat perkembangan kawasan yang paling tinggi. Perkotaan Margorejo, Margoyoso, Trangkil, Kayen, dan Wedarijaksa ditetapkan sebagai PPK yang berfungsi melayani beberapa kawasan di sekitarnya. Sementara itu, Perkotaan Dukuhseti, Batangan, Winong, Gabus, Tambakromo, Jakenan, Cluwak, Gunungwungkal, Pucakwangi, Jaken, Sukolilo, Gembong, dan Tlogowungu termasuk PPL yang berperan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat pada tingkat lokal.
5. Arahan pengembangan pusat pelayanan disusun berdasarkan fungsi masing-masing hirarki dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, penggunaan lahan, serta potensi yang dimiliki setiap kawasan. Kawasan PKL diarahkan untuk memperkuat fungsi pelayanan skala kabupaten melalui peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, perdagangan, dan jasa. Kawasan PPK diarahkan untuk meningkatkan fungsi pelayanan kawasan melalui pengembangan fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah. Sementara itu, kawasan PPL diprioritaskan pada peningkatan pelayanan dasar, aksesibilitas, dan pengembangan potensi lokal sesuai karakteristik wilayah sehingga dapat mendukung pemerataan pelayanan dan perkembangan wilayah di Kabupaten Pati.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pati maupun penelitian selanjutnya dalam upaya pengembangan sistem pusat pelayanan serta penyempurnaan penelitian mengenai pusat pelayanan wilayah. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Pati dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi terhadap sistem pusat pelayanan pada RTRW Kabupaten Pati sehingga pengembangan wilayah dapat menyesuaikan dengan kondisi eksisting dan dinamika perkembangan kawasan.

2. Pengembangan pusat pelayanan perlu dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan peningkatan kualitas sarana pelayanan, jaringan jalan, dan aksesibilitas pada kawasan PPK dan PPL agar pelayanan masyarakat dapat lebih merata serta mengurangi ketergantungan terhadap kawasan PKL.
3. Pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan, khususnya pada kawasan yang masih berada pada hirarki rendah, perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, serta pelayanan umum mampu mengurangi kesenjangan pelayanan antarwilayah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.